

EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI BANDUNG BARAT TAHUN 2019

Muhammad Ridha Iswardhana*

Universitas Teknologi Yogyakarta
muhammad.ridha@staff.uty.ac.id

*Corresponding author

Attina Maulidia Selma Attamimi

Universitas Teknologi Yogyakarta
selmaattamimi@gmail.com

Abstrak

Bandung Barat merupakan bagian dari Kabupaten Bandung yang mengalami pemekaran wilayah pada 2007. Meskipun tahun 2017 Bandung Barat mendapatkan predikat daerah otonomi terbaik, namun Bandung Barat memiliki permasalahan sosial yang belum diselesaikan berupa kemiskinan yang tinggi apalagi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat. Beberapa penyebabnya kemiskinan di Bandung Barat seperti rendahnya partisipasi pendidikan, rawan bencana, dan infrastruktur yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas otonomi daerah Bandung Barat dalam menurunkan kemiskinan. Bentuk otonomi daerah Kabupaten Bandung Barat belum signifikan mengurangi kemiskinan, diantaranya banyaknya jalan rusak, infrastruktur kurang memadai, dan kurang tanggap penanganan bencana. Akibatnya, perekonomian Bandung Barat lemah menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi.

Kata kunci: Kemiskinan, Otonomi Daerah, Infrastruktur, Pembangunan, Pendidikan.

Abstract

West Bandung is part of the Bandung Regency which underwent regional expansion in 2007. Even though in 2017 West Bandung received the title of the best autonomous region, West Bandung has unresolved social problems in the form of high poverty, especially compared to other districts in West Java Province. Several causes of poverty in West Bandung such as low participation in education, prone to disasters, and inadequate infrastructure. This research uses descriptive qualitative using secondary sources in the form of books, journals, and articles. This study aims to determine the effectiveness of regional autonomy in West Bandung in reducing poverty. The form of regional autonomy for West Bandung Regency has not significantly reduced poverty, including the many damaged roads, inadequate infrastructure, and less responsive to disaster management. As a result, West Bandung's economy is weak causing a high poverty rate.

Keywords: Poverty, Regional Autonomy, Regional Wealth, Development.

PENDAHULUAN

Tahun 2007 hingga 2009, Indonesia membentuk lima puluh tujuh (57) daerah otonom yang tersebar di seluruh Indonesia. Bandung Barat merupakan sebuah

wilayah yang mengajukan pembentukan otonomi daerah adalah (Azam, 2017). Kabupaten Bandung Barat selanjutnya berhasil melakukan pemekaran daerah dari Kabupaten Bandung secara resmi berdiri pada tanggal 2 Januari 2007. Pemekaran tersebut disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, 2023). Pada tahun 2017 Bandung Barat mendapatkan predikat sebagai daerah otonom baru terbaik dari 57 daerah otonom yang dibentuk pada tahun 2007-2009. Dari 57 daerah tersebut empat daerah menduduki peringkat tertinggi, yaitu Bandung Barat dengan nilai 3.2589, Toraja Utara (3.0728), Tangerang Selatan (3.0338), dan Kota Sungai Penuh (3.0242) (Azam, 2017). Penilaian tersebut berdasarkan data evaluasi kerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD, Pemerintah Pusat, dan Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, otonomi daerah mendorong pembangunan ekonomi di Bandung Barat, namun masih terdapat kemiskinan yang tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Maka, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam “mengapa masih terjadi kemiskinan yang tinggi di tengah keberhasilan pembangunan otonomi daerah di Bandung Barat?” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa masih terjadi kemiskinan yang tinggi di tengah keberhasilan pembangunan otonomi di Bandung Barat dan menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah Bandung Barat dalam mengatasi kemiskinan masih kurang optimal dan belum dapat dikatakan efektif.

STUDI LITERATUR

Konsep Otonomi daerah

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, suatu daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya sendiri. Ini dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan dan menjadikan kebijakan mereka lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak membutuhkan waktu yang lama (Sani, 2017).

Pada era kolonialisme, disahkan *Decentralisatie Wet S 1903/329* sebagai awal mula otonomi daerah yang menyebabkan pembentukan daerah otonom setingkat dengan keresidenan di Jawa dan Madura tahun 1903 (Hestiliani, 2019).

Beberapa daerah otonom yang dibentuk yakni Batavia, Jawa Barat, Keresidenan Palembang, Sumatera Barat, Kotapraja Medan, dan Makassar di tahun 1938. Otonomi daerah diakibatkan adanya oleh Gerakan Politik Etik untuk meningkatkan peran dan kecerdasan masyarakat pribumi serta menghentikan gerakan menuntut kemerdekaan. Wewenang daerah otonom berupa pengurusan keuangan dan hak untuk menentukan pejabat kalangan pribumi.

Masa Penjajahan Jepang otonomi daerah diterapkan pada Aturan No. 1 tahun 1942 tentang Melaksanakan Administrasi Militer. Aturan ini membagi tiga daerah pemerintahan berupa daerah militer Jawa-Madura dengan pusat di Jakarta, daerah militer Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua di Makassar; dan daerah militer Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Terdapat pula penghilangan daerah provinsi digantikan dengan tugas daerah otonomi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhan kepentingan perang Jepang baik berbentuk harta benda maupun tenaga manusia.

Pasca kemerdekaan, otonomi daerah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang mengatur pembentukan daerah-daerah otonom berupa keresidenan, kota, dan kabupaten. Kemudian otonomi daerah terus berlanjut dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Sufianto, 2020).

Beberapa konsep dasar otonomi daerah, diantaranya:

1. Kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah, selain politik luar negeri, moneter, peradilan, keagamaan, pertahanan, dan kebijakan nasional
2. Optimalisasi DPR sebagai wadah pemberdayaan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
3. Pembangunan tradisi politik sebagaimana budaya yang ada di daerah tersebut agar pemimpin diterima masyarakat.
4. Peningkatan efisiensi operasi pelayanan melalui pembenahan organisasi, perbaikan administrasi keuangan daerah, dan penetapan pendapatan daerah.
5. Pemberdayaan lembaga daerah, nilai-nilai daerah, dan peningkatan subsidi pemerintah pusat (Rasyid, 2005).

Keberhasilan otonomi daerah ditentukan melalui empat faktor. *Pertama*, indeks pembangunan manusia yang dapat dilihat dari pendidikan, tingkat harapan

hidup, tingkat literasi, dan standar hidup masyarakat. *Kedua*, pengelolaan keuangan daerah yakni apakah pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah sudah sesuai dengan anggaran keuangannya. *Ketiga*, peralatan serta sarana prasarana yang dilihat dari kegunaannya terhadap daerah tersebut. *Keempat*, organisasi yang menjadi wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan terkait tugas yang dilaksanakan. Otonomi daerah dapat memenuhi tujuan pembentukan negara guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan keamanan untuk setiap warganya. Kehidupan negara dapat terwujud berupa pemerintahan yang tertib, teratur, sejahtera, dan aman, melalui aturan perundang-undangan (Iswardhana, 2023).

Teori Kemiskinan

Ketimpangan sosial merupakan realitas yang harus dihadapi pemerintah agar tercapai kesejahteraan secara merata. Akan tetapi, berbagai kondisi, seperti faktor geografis, historis, budaya, dan kekayaan alam menyebabkan terjadinya ketimpangan yang berujung pada kemiskinan. Kemiskinan adalah Kendala seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka, seperti akses kesehatan, pendidikan, kebutuhan minimum, sanitasi, air bersih dan, hal-hal lain di luar faktor pendapatan. Beragam hal tersebut menyebabkan kemiskinan merupakan kondisi yang kompleks (Portal Ilmu, 2018).

Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi yang memiliki banyak keterbatasan yang terjadi tanpa kehendak individu yang bersangkutan. Ketika seseorang memiliki kecukupan yang rendah dalam hal tingkat kesejahteraan hidup, kesehatan, pendidikan, pendapatan, gizi, dan produktivitas kerja, seseorang dianggap miskin. Menurut World Bank, kemiskinan terdiri dari empat dimensi: kurangnya peluang, kurangnya kemampuan, kurangnya keamanan, dan kurangnya kapasitas. Kondisi kemiskinan ini dapat disebabkan oleh hambatan ekonomi, politik, dan sosial, yang berdampak pada ketidakberdayaan, keterpurukan, dan kerentanan (World Bank, 2003).

Konsep Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah merupakan proses pemisahan suatu wilayah untuk membentuk suatu bagian pemerintahan daerah baru dengan administrasinya sendiri. Menurut Swianiewicz dengan adanya pemekaran daerah menjadikannya suatu komunitas lokal yang ruang lingkupnya lebih kecil untuk mengimplementasikan kebijakan

sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut dapat menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi lebih besar (Tapparan, 2019).

Pemekaran daerah berkembang pesat di Indonesia sejak era reformasi yang menghasilkan perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB). Setiap DOB memiliki pemerintahan dengan visi misi untuk mensejahterakan rakyatnya melalui berbagai program dan otonomi daerah yang dicanangkan. Akibatnya, DOB menjadi dianggap menjadi solusi pembangunan merata di negara (Purnama et al, 2022).

Dengan adanya pemekaran daerah dapat mendukung persaingan sehat antar pemerintahan daerah untuk mendapatkan dana ke daerahnya masing-masing, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pembangunan di wilayah tersebut. Dalam UUD 1945 Pasal 18 tentang pemekaran daerah, tertulis bahwa, “NKRI terdiri dari provinsi, yang kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur peraturan. Pemerintah daerah memiliki otonomi, selama tidak berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat” (Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, 2018).

Menurut Rustiadi (2018), adanya pengembangan wilayah di Indonesia akan diikuti oleh tiga hal, yakni:

1. Pengembangan wilayah akan diikuti oleh meningkatnya peran dan wewenang pemerintah daerah maupun elit daerah, seperti adanya otonomi daerah.
2. Akan adanya perencanaan pembangunan dan juga tata kelola pemerintahan
3. Adanya peningkatan dalam pembangunan sosial-ekonomi (Rustiadi, 2018)

Meskipun begitu, DOB masih memiliki banyak kekurangan, antara lain belum menunjukkan hasil yang baik dalam tata kelola pemerintahan, proses peningkatan kesejahteraan rakyat, dan rendahnya daya saing. Terdapat kecenderungan apabila daerah otonomi baru tidak memperlihatkan hasil yang baik dibanding dengan daerah induk sebagaimana masih menjadi wilayah tertinggal (Pahlevi, 2017). Selain itu, pemekaran wilayah juga berpotensi menyebabkan adanya disintegrasi wilayah karena masyarakat di sebuah wilayah memiliki kebanggaan yang berlebihan, apabila terjadi sebuah persoalan pelik, masyarakat dapat memutuskan untuk memisahkan diri (Iswardhana, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilaksanakan untuk mendalami apa yang dipikirkan sejumlah individu atau kelompok masyarakat tentang sebuah persoalan sosial. Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data khusus untuk menjelaskan fenomena dan menggambarkan substansi dan kedalaman data. Sugiyono (2012) mendefinisikan metode deskriptif sendiri sebagai metode yang memungkinkan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang subjek yang diteliti. Riset ini dilakukan melalui data skunder yang telah dikumpulkan sebagaimana dilanjutkan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang dapat diterima secara logis (Nugrahani, 2014).

Dalam melakukan analisis kasus, penulis menggunakan tiga alat analisis, yaitu Konsep Otonomi daerah, Teori Kemiskinan, dan Konsep Pemekaran Daerah. Melalui ketiga konsep maupun teori tersebut diharapkan mampu menjawab penyebab dan solusi tingginya kemiskinan di Bandung Barat.

PEMBAHASAN

Sejarah Otonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat

Rencana pemekaran Kabupaten Bandung Barat sudah muncul sejak tahun 1999. Bupati Bandung H.U Hatta Djati Permana mengajukan permohonan pemekaran Bandung barat dengan mengirimkan surat kepada DPRD Bandung. Surat permohonan Bupati nomor 135/1235/Taipem 22 Juni 1999 merupakan bukti keseriusan rencana pemekaran wilayah Bandung barat. Meskipun disambut positif DPRD Kabupaten Bandung, rencana pemekaran wilayah Bandung Barat harus ditunda terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bandung dengan mengirimkan surat No. 135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung, yang berisikan "Sesuai UU No. 5/74 bahwa proses awal pemekaran wilayah Bandung Barat akan ditangguhkan atau dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya" (Pemprov Jawa Barat, 2017).

Penundaan proses pemekaran wilayah Bandung Barat untuk menjadi wilayah otonom menjadikan banyak masyarakat yang membentuk forum-forum yang memperjuangkan percepatan pemekaran wilayah Bandung Barat. Terdapat pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemandirian pengaturan wilayah Bandung Barat.

Berbagai LSM tersebut selanjutnya menjadi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang dipimpin oleh Drs. H. Endang Anwar. Komitmen KPKBB dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Bandung Barat diawali dengan upaya deklarasi bersama untuk terus memperjuangkan dan mempercepat otonomi daerah Bandung Barat yang terpisah dari Kabupaten Bandung pada 30 Agustus 2003. Pada akhirnya, melalui UU Republik Indonesia No.12 Tahun 2007 menyatakan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Bandung Barat, 2017). Sejak saat dideklarasikan sebagai daerah otonom dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung barat sudah memiliki Bupati sementara yaitu Drs. H. Tjatja Kuswara hingga tahun jabatan 2008.

Kondisi Masyarakat di Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat memiliki luas 1.305.77 km² dengan terdiri dari 165 desa dan 16 kecamatan (Pemprov Jawa Barat, 2017). Luas wilayahnya setara dengan 3,74 persen dari luas provinsi Jawa Barat. Wilayah ini berbatasan dengan di utara dengan Kabupaten Purwakarta dan Subang; Kabupaten Bandung dan Cianjur di sebelah barat; di selatan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur; dan di timur dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Kabupaten Bandung Barat memiliki iklim yang subur dengan banyak bukit dengan ketinggian yang berbeda. Sangat cocok untuk perkebunan, peternakan, pertanian, dan wisata alam. Sumber daya alam yang melimpah di Bandung Barat memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Ekonomi Kabupaten Bandung Barat tumbuh sebesar 4,79% pada tahun 2010, dengan PDRB dengan nilai Rp 17,10 Triliun. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Bandung Barat mengalami kenaikan, tingkat kemiskinan di Bandung Barat masih tinggi (Badan Pusat Statistik, 2010). Tetapi, pada tahun 2019, kemiskinan di Bandung Barat mencapai 9,38% dan termasuk Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2019).

Terdapat sekitar 192 ribu warga atau 11,49% dari jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun sempat penurunan tingkat kemiskinan di Bandung Barat dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 17,61%. Namun, dari 11,49% penduduk yang mengalami kemiskinan, 55,7% penduduk di Bandung Barat tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Meski ada penurunan tingkat kemiskinan di Bandung Barat akan tetapi hal tersebut terbilang masih cukup tinggi

untuk angka kemiskinannya dibandingkan dengan Kabupaten Bandung yang angka kemiskinannya 7,6% (Nasir, 2018). Tahun 2019 sebanyak 62.000 penduduk Bandung Barat yang menganggur. Pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 pengangguran di Bandung Barat bertambah sebanyak 5.000 warga. Hal tersebut disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada saat Pandemi Covid-19 yang dilakukan banyak perusahaan untuk menekan biaya produksi (Haryanto, 2020).

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menekan angka pengangguran tersebut dengan mengajak warganya untuk bekerja di bidang pertanian. Pemerintah kabupaten Bandung Barat menyiapkan 10 hektare di kampung Cinangsi. Kegiatan ini ditandai dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan antara Kemnaker RI dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Junari, 2020).

Perekonomian Bandung Barat

Bentuk ekonomi di wilayah Bandung Barat ditunjukkan adanya pembangunan pasar-pasar tradisional dan layanan transportasi. Berdasarkan data statistik perdagangan keadaan pasar di wilayah Bandung Barat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya pasar non permanen, toko dan kios (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2018). Terdapat 1.000 pasar non permanen yang tersebar di 13 kecamatan dengan Kecamatan Ngamprah sebagai Ibukota Kabupaten memiliki 515 pasar non permanen. Kecamatan Cipeundeuy menempati peringkat kedua dengan kepemilikan 333 pasar non permanen. Lalu, hampir di seluruh kecamatan terdapat sekitar 46.858 toko yang tersebar dan 7.903 kios yang juga berkembang di seluruh kecamatan. Menindaklanjuti realitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendirikan banyak terminal demi kelancaran arus perdagangan dan transportasi. Pada tahun 2016, tercatat terdapat 24 terminal di kabupaten ini.

Pada tahun 2013, kemiskinan di Bandung Barat berada di angka 12,92%. Data terbaru tahun 2018 dan 2019 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Bandung barat menurun menjadi 10,06% dan 9,38%. Penurunan persentase kemiskinan di Bandung Barat sangat progresif, namun masih pada tingkat kemiskinan yang tinggi, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. kemiskinan di Bandung Barat merupakan salah satu yang tertinggi, dengan persentase Kabupaten Cianjur 9,15%, Sukabumi 6,22%, Bandung 5,94%, Kota Bandung 3,38%, dan Kota Bogor 5,77%. Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sudah dilakukan,

namun angka kemiskinan masih tinggi. Selain itu, banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di Bandung Barat seperti tingkat pendidikan, kondisi wilayah, serta infrastruktur yang kurang memadai membuat pembangunan di Bandung Barat mengalami banyak hambatan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2019).

Faktor Penyebab Kemiskinan Bandung Barat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tolok ukur penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM diukur dengan mengukur bagaimana masyarakat memperoleh manfaat pembangunan melalui peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. IPM di Kabupaten Bandung Barat terjadi kenaikan setiap tahunnya, dari tahun 2010 dengan angka 60,34 hingga 67,46 pada tahun 2018 mengalami kenaikan 7,12 persen dalam delapan tahun, merupakan kenaikan yang positif.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Bandung Barat Tahun 2010-2018
 Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2018.

Tahun	IPM	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran
2010	61.34	71.5	9.68	7.03	6702.17
2011	62.36	71.53	10.09	7.33	6788.49
2012	63.17	71.55	10.53	7.36	6975.56
2013	63.93	71.56	11	7.39	7112.25
2014	64.27	71.56	11.06	7.51	7188.04
2015	65.23	71.76	11.39	7.53	7522.14
2016	65.81	71.82	11.56	7.63	7698
2017	66.63	71.87	11.79	7.74	8002
2018	67.46	72.03	11.83	7.97	8329

Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2018, 2023

Berdasarkan tabel diatas, indikator yang digunakan dalam menentukan IPM suatu wilayah adalah pengeluaran perkapita, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (MYS), dan Harapan Lama Sekolah (EYS) (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2018). Meskipun IPM Bandung Barat selalu mengalami kenaikan, masih terdapat masalah yang belum terselesaikan yaitu kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Bandung Barat merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan

kabupaten di Provinsi Jawa Barat lainnya. Beberapa penyebab kemiskinan tersebut, antara lain:

a). Pendidikan

Menurut IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2015, bidang pendidikan mencapai angka 65,23. Data menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat. Dalam kelompok usia 7-24 tahun, 0,25% tidak atau belum pernah sekolah; 35,33% laki-laki dan 35,86% perempuan masih berada di Sekolah Dasar atau sekolah menengah; 15,93% laki-laki dan 16,38% perempuan masih berada di Sekolah Menengah Pertama atau sekolah menengah; dan 14,26% laki-laki dan 15,41% perempuan masih berada di Sekolah Menengah atas atau sekolah menengah. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah formal di Bandung Barat sebesar:

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah formal di Bandung Barat

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	7-12 tahun	99,31%	100%
2.	13-15 tahun	90,11%	96,13%
3.	16-18 tahun	59,93%	50,94%

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2020

Menurut Badan Statistik Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 data terbaru penduduk yang memiliki status pendidikan SD 13,23%, SMP 4,79%, SMA 3,59%, dan sarjana 1.40% (data laki-laki dan perempuan) persentase tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin minim partisipasi masyarakat dalam Pendidikan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2019). Hal tersebut menunjukkan partisipasi siswa dan siswi di Kabupaten Bandung Barat terhadap akses pendidikan kurang menjadi perhatian, terutama jenjang SMA. Padahal banyak lowongan kerja yang mengharuskan lulus dari jenjang sekolah menengah keatas (SMA).

Kesadaran akan pentingnya pendidikan nampaknya belum terlalu dianggap penting oleh masyarakat di Bandung Barat. Padahal ketersediaan sekolah-sekolah di Bandung Barat sudah memadai di setiap kecamatannya. Permasalahan ekonomi dalam pembiayaan pendidikan juga merupakan permasalahan utama bagi masyarakat miskin di Bandung Barat. Rendahnya pendidikan berdampak pada

rendahnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan adanya keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran.

b) Wilayah Rawan Bencana

Geologi Kabupaten Bandung Barat membuatnya rawan terhadap gempa bumi, terutama gempa bumi tektonik dan vulkanik. Di sesar Lembang, gempa bumi dapat terjadi, sementara di sekitar Gunung Tangkuban Perahu, letusan gunung berapi dapat terjadi. Selain gempa bumi, Kabupaten Bandung Barat juga rawan longsor karena pergeseran tanah akibat hujan lebat dan banyaknya struktur yang merusak lingkungan, terutama pohon-pohon. Tempat-tempat di Cisarua, Cikalongwetan, Gununghalu, Cililin, Lembang, Sindangkerta, Cipatat, Batujajar, dan Rajamandala sering mengalami longsor (Bappelitbangda Bandung Barat, 2018).

Banjir juga merupakan ancaman bagi pembangunan di Bandung Barat. Hal ini terjadi ketika curah hujan tinggi menyebabkan meluapnya air sungai dan hancurnya tanggul air. Kawasan yang rawan banjir adalah daerah sepanjang sungai Citarum diakibatkan kerusakan lingkungan oleh masyarakat. Kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah di sungai dan merusak hutan untuk dijadikan lahan pertanian merupakan penyebab dari banjir yang melanda Bandung Barat.

c) Infrastruktur

Jauhnya jarak dari desa ke ibukota kabupaten dan pusat-pusat ekonomi mempersulit interaksi ekonomi antar penduduk dan membutuhkan waktu yang lama (Hasibuan et al, 2019). Dampaknya, banyak masyarakat Bandung Barat yang melakukan urbanisasi ke daerah-daerah lain yang lebih maju untuk mencari mata pencaharian. Pembangunan akses jalan merupakan upaya dalam meningkatkan stimulus pertumbuhan ekonomi. Namun, realitasnya kondisi jalan di wilayah Selatan Bandung Barat masih buruk pasca otonomi daerah.

Selain itu, transportasi, air bersih, drainase, dan limbah dianggap tidak banyak berubah. Utamanya daerah Sindangkerta Cihampelas, Gununghalu Cililin, dan Rongga banyak jalan masih rusak dan sempit (Bappelitbangda Bandung Barat, 2018).

Tabel 3. Kondisi Jalan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013

No	Kondisi Jalan	Panjang (Km)	Persentase (%)
1.	Baik	147,55	26,7 (Anshori, 2021)
2.	Sedang	123,37	22,3
3.	Rusak	236,80	42,8
4.	Rusak Berat	45,93	8,3
	Total	553,65	100%

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2018

Dari tabel 2 kondisi jalan yang mengalami kerusakan adalah yang paling besar persentasenya yaitu 42,8% setara dengan 236,80 Km (2013). Sedangkan kondisi jalan yang sudah baik sebanyak 26,7% atau setara dengan 147,55 Km. Angka ini dapat dijadikan bahan evaluasi bahwa kondisi jalan di Bandung Barat dalam upaya menunjang kegiatan ekonomi, dan lainnya sangat kurang. Dibuktikan dengan kondisi jalan yang rusak lebih panjang, dibandingkan kondisi jalan yang sudah baik.

Perbaikan jalan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 mengalami pengurangan signifikan akibat APBD digunakan sebagai stimulus penanganan penyebaran Covid-19. Infrastruktur jalan di daerah selatan telah diperbarui oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan biaya Rp 285 Miliar pada 2021 (Anshori, 2021). Penanganan dalam perbaikan jalan di daerah selatan Bandung Barat cenderung lambat, padahal kondisi jalan yang rusak telah berlangsung lama. Meskipun begitu upaya pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus di dukung, sehingga akses ke dalam dan keluar Bandung Barat bisa lebih baik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

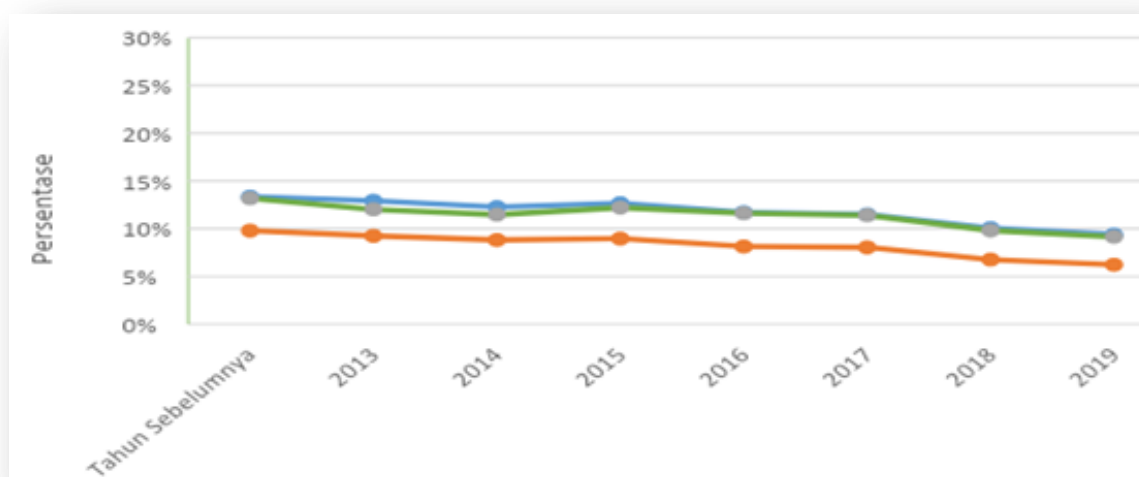
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Kemiskinan di Bandung Barat

Meskipun tergolong tinggi, kemiskinan di Bandung Barat dalam periode 2013-2019 banyak mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan pada tahun 2013 sebanyak 12,92%, kemudian berkurang menjadi 12,26% dan sempat naik di tahun 2015 menjadi 12,67%. Kemudian mengalami penurunan signifikan 11,71% pada tahun 2016. Di tahun 2017, persentase kemiskinan sedikit menurun menjadi 11,49% dan tingkat kemiskinan di Bandung barat menurun menjadi 10,06% pada 2018 dan

9,38% tahun 2019 sebagaimana gambar 2 di bawah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2019).

Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu daerah, tidak berarti menjamin tingkat kemiskinan di daerah tersebut juga berkurang. Meski tergolong sebagai kabupaten di Jawa Barat yang maju dari segi pembangunannya, nyatanya Bandung Barat masih tergolong sebagai daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Dari data BPS 2019, Bandung Barat memiliki beberapa sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi seperti industri pengolahan sebesar 39,78%, reparasi kendaraan sebesar 14,45% dan sektor pertanian, dan kehutanan maupun perikanan sebesar 13,15%. Akan tetapi besarnya angka ini, belum mampu mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat (Hasibuan et al, 2019).

Gambar 1. Persentase Kemiskinan Beberapa Kabupaten di Jawa Barat 2013-2019



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat 2018

Kekayaan alam Bandung Barat tidak hanya membawa manfaat bagi perekonomian warga, melainkan wilayah ini juga dianggap rawan terjadi bencana menyebabkan terhambatnya pembangunan. Hal tersebut diakibatkan oleh kerusakan yang ditimbulkan dan alokasi dana yang digunakan memperbaiki kondisi wilayah yang terkena bencana. Padahal dana tersebut seharusnya untuk pembangunan dan program lainnya. Bencana alam yang sering terjadi di Bandung Barat berdampak terhadap fasilitas umum, seperti rusaknya jalan aspal dan kabel listrik akibat pergeseran gempa bumi, longsor tanah merusak infrastruktur jalan dan

akses telekomunikasi, dan banjir yang menghancurkan pasar. Penulis setuju bahwa pemekaran di Bandung Barat diakibatkan adanya *administrative dispersion* bahwa wilayah pemerintahan yang terlalu luas menyebabkan wilayah yang lainnya tidak bisa dijangkau yang menyebabkan berbagai masalah sosial. Apalagi, untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat secara keseluruhan, birokrasi harus selalu melakukan yang terbaik. Pemerintah perlu mempunyai solusi terbaik untuk masalah yang sering dihadapi, terutama masalah yang datang dari masyarakat sendiri sebagai pengguna jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditangani oleh birokrasi (Khaerah et al, 2019). Solusi kondisi tersebut dilakukan dengan mengatasi jarak kendali pemerintahan agar bisa memperpendek jarak daerah masyarakat dengan pusat kota. Agar ruang lingkup pemerintahan daerah lebih maksimal, pemekaran diharapkan dapat menjadi wadah untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengoptimalkan SDA, mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menyelesaikan bermacam masalah sosial (Rizky et al, 2021).

Adanya pemekaran wilayah tersebut menjadikan Bandung Barat memiliki otonomi daerahnya sendiri, yang dapat mengatur, mewadahi, dan menjalankan dalam setiap upaya pengoptimalan potensi sumber daya-sumber daya yang berada di wilayah tersebut. Adanya pengoptimalan SDA dan SDM di Bandung Barat harus disertai dengan peningkatan pelayanan umum dan fasilitas daerah bagi setiap individu. Dengan pengoptimalan sumber daya dan pelayanan umum menyebabkan kenaikan pendapatan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan pemekaran daerah untuk pengembangan ekonomi perkampungan, memberdayakan usaha rakyat, penyediaan lapangan pekerjaan, akses terhadap kebutuhan dasar manusia, dan terwujudnya kesejahteraan warga setempat (Silangit, 2022). Berbagai hal tersebut seharusnya menjadi prioritas untuk diwujudkan secara nyata di Bandung Barat.

Apabila ditilik dari empat faktor penentu keberhasilan otonomi daerah, seperti pendidikan, pengelolaan keuangan daerah, sarana prasarana, dan organisasi pemerintah, dalam hal ini otonomi daerah Bandung Barat belum dianggap berhasil. Pendidikan masih terbatas, tingkat harapan hidup dan akses kesehatan terbatas ditunjukkan minimnya rumah sakit, peralatan sarana dan prasarana juga masih kurang karena pembangunan mengutamakan sarana pemerintah, dan belum ada

organisasi penanganan isu-isu kemiskinan. Pemerintah daerah harus memiliki program bantuan sosial bersyarat yang berfokus pada kelompok penerima untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui bantuan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Mengatasi kemiskinan tidak hanya dengan komunikasi, tetapi juga dengan sumber daya dan pelatihan untuk membantu masyarakat mengembangkan keahlian setiap warga (Darmiyanti, 2022). Adanya berbagai kerusakan jalan juga berpengaruh terhadap produktivitas warga dan pengelolaan kekayaan daerah dalam berbagai aktivitasnya, mempengaruhi minat investor maupun wisatawan ke Bandung Barat, menghambat laju perekonomian, dan membatasi akses terhadap fasilitas umum.

Kemiskinan di Bandung Barat adalah realitas yang mendorong pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut disebabkan wilayah Bandung barat berada di pegunungan dan jauh dari pusat pemerintahan kota menyebabkan pembangunan terbatas. Pasca otonomi daerah keadaan ekonomi masyarakat Bandung Barat dapat dikatakan mengalami perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum mulai dilakukan. Meskipun begitu, tingkat kemiskinan cenderung masih tinggi. Beberapa kebijakan Kabupaten Bandung Barat yang dianggap belum tepat sasaran, ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan namun cenderung mengesampingkan infrastruktur vital seperti pembangunan jalan, dan rumah sakit. Pemerintah daerah seharusnya mengutamakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat daripada infrastruktur pemerintahan. Apalagi jika infrastruktur memadai maka kemudahan logistik akan mendorong investasi dan pariwisata ke Bandung Barat. Pemerintah daerah perlu pula aktif mengembangkan pariwisata, yang merupakan pilar penting dalam kemajuan pembangunan daerah. Sebagaimana pariwisata memiliki prospek yang besar, tetapi membutuhkan rencana pengembangan. Pada akhirnya hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemasukan daerah (Putri, 2022).

Walaupun Bandung Barat dinobatkan sebagai daerah otonom baru terbaik pada tahun 2017, namun tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kualitas pembangunan manusia yang dapat berdampak lemahnya akses dunia kerja, kurangnya infrastruktur yang memfasilitasi akses desa ke kota, serta keadaan daerah Bandung Barat sendiri yang

rawan banjir. Otonomi daerah seharusnya diimplementasikan melalui kebijakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Sementara peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga cenderung terbatas sebagai koordinasi dalam hubungan antar aktor pembangunan. Padahal partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan mengawasi pemerintahan penting untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan kewajiban dengan baik (Iswardhana et al, 2023).

Pentingnya pembentukan otonomi daerah di Indonesia adalah karena luasnya wilayah yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah yang luput dari perhatian pemerintah pusat. Karena itu dibentuklah otonomi daerah yang dapat mempermudah penyelesaian masalah-masalah di wilayah tersebut. Dengan dibentuknya otonomi daerah maka akan meningkatkan pelayanan umum di daerah otonom, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat meningkatkan daya saing daerah, serta diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia. Otonomi daerah seharusnya dapat mengoptimalkan berbagai potensi daerah sebagai modal utama terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan. Hal tersebut memberikan peluang kerja sama antar daerah yang memudahkan pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional. Apalagi melalui otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan umum secara maksimal sebagaimana fungsi negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan rakyat. Jika kebutuhan rakyat telah terpenuhi dapat meningkatkan produktivitas yang selanjutnya pendapatan bertambah, dan daya saing daerah menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Pemekaran di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat menjadi wadah untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengoptimalkan SDA. Kabupaten Bandung Barat memiliki kondisi geografis yang cocok untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan wisata alam. Sejak tahun 2019 masih tinggi angka kemiskinan meskipun tingkat perekonomian relatif tinggi. Namun pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu daerah, tidak berarti menjamin tingkat kemiskinan di daerah tersebut juga berkurang Otonomi daerah dianggap kurang optimal sebagaimana kebijakan Bandung Barat. Adanya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak menjamin tingkat kemiskinan berkurang.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan otonomi daerah belum efektif sebagaimana belum mensejahterakan masyarakat sepenuhnya. Tingginya tingkat kemiskinan membuat pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan segala upaya untuk menurunkan angka kemiskinan seperti kerjasama dalam membangun wisata, menekan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan infrastruktur agar dapat memaksimalkan produktifitas masyarakat. Perlu dilakukan berbagai inovasi, berupa konsistensi implementasi pembangunan, penanganan aspek geografi Bandung Barat rawan banjir, dan melakukan pelatihan guna menghasilkan SDM berkualitas. Sehingga apabila berbagai hal tersebut dilaksanakan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Bandung Barat.

Saran dari penulis, diantaranya *pertama*, Bandung Barat sebaiknya memperbaiki kualitas SDM, memanfaatkan potensi SDA, membangun infrastruktur dan pelayanan publik. *Kedua*, peningkatan pendidikan agar kualitas masyarakat lebih unggul di Bandung Barat untuk mempersiapkan dunia kerja. *Ketiga*, peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, perlunya indikator capaian otonomi daerah pengurangan kemiskinan dan target pembangunan sebagai bahan evaluasi. *Kelima*, analisis transparan memaksimalkan penyerapan anggaran pengentasan kemiskinan secara konkret.

REFERENSI

- Anshori, Asep Yusuf. 2021. "Perbaikan Jalan di Selatan Kabupaten Bandung Barat Dimulai Januari 2021". *Prfmnews.id*. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-131203872/perbaikan-jalan-di-selatan-kabupaten-bandung-barat-dimulai-januari-2021>.
- Badan Pusat Statistik. 2010. "Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2010". *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat*. <https://bandungbaratkab.bps.go.id/publication/2011/09/13/d54dbfa0fdf0bd38068e57cd/kabupaten-bandung-barat-dalam-angka-2010.html#:~:text=Kabupaten%20Bandung%20Barat%20dalam%20angka%202010%20Unduh%20PublikasiUnduh,Nomor%20Publikasi%20%3A%203217000.1%20Tanggal%20Rilis%20%3A%202011-09-13>
- BPS Kabupaten Bandung Barat. 2018. "Data Bandung Barat 2018 (Metode Baru)". *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat*. <https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/3217>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2019. "Persentase Penduduk Miskin (Persen) 2017-2019". *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/2/persentase-penduduk->

[miskin.html#:~:text=Wilayah%20Jawa%20Barat%20Persentase%20Penduduk%20Miskin%20%28Persen%29,2017%202018%202019%20Provinsi%20Jawa%20Barat%208%2C71%207%2C45.](#)

- Darmiyanti, Reza. 2022. "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2016-2020". *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 5(2): 111-114.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2023. "Sejarah Singkat Lahirnya Kabupaten Bandung Barat". *Pemerintah Kabupaten Bandung Barat*. <https://bandungbaratkab.go.id/halaman/sejarah-kbb>.
- Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat. 2018. "Tinjauan Umum Kabupaten Bandung Barat". *Badan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat*. https://bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id/kajian/bid-sosial/181106143719_BABII_TINJAUANUMUM.pdf.
- Haryanto, Adi. 2020. "Dampak covid 19 5000 lebih warga Bandung Barat jadi pengangguran". *Inew.id*. <https://jabar.inews.id/berita/dampak-covid-19-5000-lebih-warga-bandung-barat-jadi-pengangguran>".
- Hasibuan, S. N., Juanda, B. & Mulatsih, S. 2019. "Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat". *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)* 7(2): 79-91
- Hestiliani, Teti. 2019. "Decentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903". *Istoria Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 15(2): 206-213.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2020. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. Yogyakarta: PT Kanisius. 133-136.
- Iswardhana, M. R. 2023. "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial". *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1): 1083–1088.
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H., Wibawa, A., Risky, L., & Setyo Pratiwi, T. 2023. "Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di Sman 4 Yogyakarta". *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin* 2(1): 6–10.
- Khaerah, Nur; Harakan, Ahmad; Junaedi. 2019. "CALL CENTRE BRIGADE SIAGA BENCANA SEBAGAI STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANTAENG". *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 2(1): 51-54.
- Nasir, Hendry. 2018. "Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat". *Bandung Barat Pos*. <https://www.bandungbaratpos.com/2018/11/16/pengentasan-kemiskinan-kabupaten-bandung-barat/>.
- Pahlevi. 2017. *Dinamika Politik Pemekaran Daerah*. Jakarta: BAPPENAS.
- Portal Ilmu. 2018. "Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial". *Portalilmu.com*. <https://portal-ilmu.com/konsep-kemiskinan-dan-ketimpangan-sosial/>.
- Putri, Risky Ananda. 2022. "POLITIK EKOWISATA: STRATEGI RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PESISIR DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- (KEK) PANTAI TIMUR SUNGAILIAT". *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 5(1): 38-44.
- Purnama, A.B & Iswardhana, M.R. 2022. "Kalimantan Border Issues And Indonesia's Border Diplomacy Towards Malaysia". *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara* 10(2): 105-107.
- Rasyid. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 10-13.
- Rizky, Lucitania; Pratiwi, Tiffany Setyo; Chotimah, Hidayat Chusnul; Iswardhana, Muhammad Ridha; Wibawa, Adi; Arisanto, Puguh Toko. 2021. "Budidaya Jamur pada Ibu-Ibu Rumah Tanga di Dusun Kruwet untuk Mewujudkan SDGs 2030". *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3): 177–180.
- Rustiadi, S Saefulhakim & Panuju, D. R. 2018. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 3.
- Silangit, Dayen Iqwana. 2022. "STRATEGI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017-2020". *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 5(2): 141-151.
- Sufianto, D. 2020. "Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia". *Jurnal Academia Praja* 3(2): 271–288.
- Tapparan, S. R. & Wahab. A. 2019. "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Pemekaran Kabupaten Toraja Utara Dari Tana Toraja)". *Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran* 5(1): 1-5
- World Bank. 2003. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan Edisi Terjemahan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.